



► NASIB PEKERJA

Jogja Masih Terhindar dari Badai PHK

Lugas Subarkah & Ni Luh Anggela
redaksi@jibinews.co

JOGJA—Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat terjadinya lonjakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang paruh pertama 2024. Meski demikian, untuk wilayah Kota Jogja sejauh ini disebut belum ada lonjakan signifikan.

Dilansir dari berbagai sumber, berdasarkan data Kemenaker, jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang Januari-Juni 2024 totalnya sebanyak 32.064 orang, melonjak sebesar 21,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni 26.400 orang.

Jogja Masih...

Kabid Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogja, Pipin Ani Sulistiani, menjelaskan secara nasional, memang terjadi lonjakan PHK.

"Mungkin beberapa daerah mengalami gelombang PHK di sektor-sektor tertentu," ujarnya, Senin (5/8).

Adapun untuk Kota Jogja menurutnya sejauh ini tidak ada lonjakan signifikan. Ia mencatat jumlah PHK yang dilaporkan sejak Januari 2024 hanya 72 orang. "Untuk Kota Jogja landai-landai saja. Kalupun ada PHK, bukan PHK massal." Ia melihat hal ini disebabkan perusahaan di Kota Jogja sebagian besar bergerak di sektor jasa, khususnya jasa pariwisata. "Sektor pariwisata tidak mengalami keterpurukan, bahkan kalau kita lihat cenderung mengalami peningkatan," katanya.

Sebagai upaya pencegahan terjadinya PHK, pihaknya secara intensif membina dan sosialisasi di perusahaan-perusahaan. "Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan baik kepada pekerja maupun pemberi kerja." Walau minim catatan PHK, beberapa perusahaan ditengarai melakukan PHK dengan modus terselubung. Hal ini seperti yang dialami Sinta, pekerja dari sebuah perusahaan swasta berpusat di Jakarta yang membuka kantor biro di Jogja.

Ia menceritakan modus PHK di perusahaannya dilakukan dengan meminta seluruh

pekerja menandatangani surat pernyataan bermaterai yang isinya menyepakati kebijakan perusahaan baru dengan beban kerja lebih berat. "Kalau enggak mau tanda tangan dianggap *resign* sukarela," ungkapnya.

Kebijakan yang mengubah *Key Performance Indicator* (KPI) tersebut mulai disosialisasikan pada awal Juli lalu. Pekerja yang menandatangani tetapi tidak mampu mencapai target KPI yang baru maka akan mendapatkan sanksi secara berkala. "Rincian KPI terlalu memberatkan pekerja, target yang ditetapkan sangat tidak masuk akal," katanya.

Jika pekerja tidak menandatangani surat pernyataan tersebut, maka dianggap *resign* secara sukarela, sehingga mengakhiri masa kerjanya tanpa mendapatkan hak pesangon selayaknya pekerja yang terkena PHK. "Memang maksudnya pengin efisiensi pekerja tanpa perlu bayar pesangon," ujarnya.

Tenaga Kerja

Sebelumnya, Kemenaker mencatat hingga Juni 2024 setidaknya sebanyak 32.064 orang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Merujuk Satudata Kemenaker, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tenaga kerja yang paling banyak dirumahkan hingga Juni 2024. "Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu sekitar 23,29% dari jumlah keseluruhan kasus yang dilaporkan," ungkap Kemenaker,

dikutip Kamis (1/8).

Secara terperinci, Kemenaker melaporkan bahwa total tenaga kerja yang kena PHK di DKI Jakarta mencapai 7.469 orang, diikuti Banten 6.135 orang, Jawa Barat 5.155 orang, Jawa Tengah 4.275 orang, Sulawesi Tengah 1.812 orang, dan Bangka Belitung 1.527 orang.

Adapun total tenaga kerja yang di PHK hingga Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar 21,4% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 26.400 tenaga kerja. Pada periode tersebut, tercatat Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah tenaga kerja yang paling banyak di PHK yakni sebanyak 11.595 orang, diikuti Banten 5.141 orang, Jawa Tengah 4.887 orang, Kalimantan Selatan 727 orang, DKI Jakarta 683 orang, dan Sulawesi Selatan 478 orang.

Sementara itu, berdasarkan catatan *Jaringan Informasi Bisnis Indonesia* (JIBI), Kamis (6/6), Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melaporkan bahwa sebanyak 10.800 pekerja tekstil dirumahkan sepanjang periode Januari-Mei 2024. Total 10.800 pekerja yang di PHK ini berasal dari lima pabrik yang terpaksa berhenti beroperasi.

Presiden KSPN, Ristadi, menyebut pesanan tekstil di pabrik lokal yang masih lemah telah menyebabkan pabrik berhenti beroperasi lantaran tak ada pesanan. Selain itu, pasar ekspor pun masih dalam tren menurun. (*Bisnis.com*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005